

Perdagangan Di Pelabuhan Samarinda Pada Abad Ke-19

Ita Syamtasiyah Ahyat
Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia
Ita_ahyat@yahoo.co.id

Abstrak.

Samarinda merupakan pintu gerbang Kesultanan Kutai. Sebelum barang-barang masuk ke Kesultanan Kutai, barang-barang tersebut harus melalui pelabuhan Samarinda. Kegiatan perdagangan di pelabuhan semakin meningkat dengan keluar masuknya kapal dari berbagai daerah, terutama dengan ditemukannya minyak dan batubara di sepanjang Sungai Mahakam.

Belanda yang berkedudukan di Kalimantan pada abad ke-19, merasa berkepentingan dengan kegiatan perdagangan di Samarinda tersebut. Melalui penguasa pelabuhan Samarinda yaitu Sultan Kutai, Belanda berusaha untuk ikut campur dalam perdagangan di Samarinda dengan menempatkan seorang Asisten Residen yang berkedudukan di sana. Hal ini membuat perdagangan menurun dalam bidang ekspor dan impor barang-barang, serta keadaan tidak aman, walaupun begitu aktivitas perdagangan tetap ramai.

Makalah ini ingin mengangkat bagaimana penguasa pelabuhan dan syahbandar berusaha menjaga aktivitas perdagangan di Samarinda agar selalu tetap ramai dan aman, sehingga memberikan pemasukan yang cukup ke kesultanan. Selama proses perumusan makalah ini, digunakan data-data sejarah berupa sumber naskah, dokumen dan buku-buku yang relevan untuk merekonstruksikan kejadian pada abad ke-19 tersebut.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pengukuhan kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda di Kalimantan dimaksudkan untuk menjaga agar jangan sampai kekuasaan Kerajaan Inggris di kawasan sebelah utara Selat Malaka, termasuk juga kawasan Kalimantan Utara, makin meluas. Kecuali itu, pengukuhan kekuasaan Kerajaan Belanda di Kalimantan ditujukan untuk mencegah jangan sampai ada negara Eropa lainnya menduduki bagian-bagian Kalimantan, yang dianggapnya masih kosong dari kekuasaan bangsa Eropa¹.

Sampai tahun 1846, Pemerintah Hindia Belanda di Kalimantan pada prinsipnya membatasi kekuasaannya di kota-kota pantai saja, sedangkan pemerintahannya dibatasi

¹ Ged.Komm. 5 December 1845 La A 10, ANRI.

sejauh menyangkut urusan-urusan yang langsung berhubungan dengan kepentingannya, terutama kepentingan perdagangan dan keamanan. Urusan perdagangan yang dikuasainya terutama adalah bea cukai di pelabuhan-pelabuhan dan monopoli perdagangan garam dan candu. Urusan keamanan dibatasi pada keamanan pantai dan urusan kepolisian serta pengadilan, yang langsung menyangkut keamanan umum dan keamanan kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda. Orang Belanda dan semua orang asing, termasuk juga orang-orang pribumi bukan kelahiran Kalimantan, langsung berada di bawah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda. Urusan selebihnya tetap dipegang oleh penguasa-penguasa pribumi tradisional yang menjalankan kekuasaannya menurut ketentuan adat setempat yang berlaku. Benteng-benteng dan jumlah pasukan Belanda dibatasi seperlunya².

Berhubung situasi politik di Kalimantan, yaitu adanya kekuasaan Inggris di Kalimantan Utara, maka Pemerintah Hindia Belanda mulai memperluas kekuasaannya di Kalimantan secara politik. Ekspedisi-ekspedisi dikirimkan ke daerah pedalaman untuk menentukan batas kawasan yang menjadi hak Pemerintah Hindia Belanda, terutama batas di sebelah utara dan timur. Pada bulan Juni 1846, suatu ekspedisi di bawah pimpinan Letnan II O. von Kessel yang menjelajahi pedalaman Kalimantan dari arah Pontianak, sedangkan pada bulan September 1846 ekspedisi Dr. C. M. Schwaner menjelajah dari arah timur. Di samping ekspedisi-ekspedisi tersebut, pos-pos pemerintah juga ditambah, terutama di *afdeeling* Pantai Kalimantan Selatan dan Pantai Kalimantan Timur. Pada bulan April 1846, diangkat seorang penguasa sipil di Kutai, dan pada bulan Februari 1847 di Kalimantan Selatan juga ditempatkan seorang penguasa sipil yang berkedudukan di Kotawaringin. Selain itu, pada bulan April 1847, semua pembesar *afdeeling* Kalimantan diperintahkan agar menemui raja-raja dan kepala-kepala suku untuk mengingatkan atau memperbaharui isi perjanjian-perjanjian yang pernah mereka buat dengan Pemerintah Hindia Belanda dan membuat perjanjian-perjanjian dengan mereka yang belum pernah mengadakan hubungan dengan Pemerintah Hindia Belanda³.

Pemerintah Hindia Belanda sejak itu mulai memperhatikan daerah-daerah pantai timur Kalimantan, misalnya, dengan mengirimkan kapal perang (*oorlogs schroef stoomschip*) Z. M. Samarang yang dipimpin oleh *Luitenant Iste klasse Wichers* ke sana⁴. Diperintahkan kepada residen *Zuid-en Oosterafdeeling van Borneo* untuk mengadakan atau pun memperbaharui perjanjian kepada raja-raja maupun kepala-kepala di sana agar mengakui kekuasaan Belanda secara tertulis. Tempat-tempat yang dikunjungi adalah Kutai, Gunung Tabur, Sambaliung, Bulungan, Pasir, Pulau Laut, Batu Licin dan Pagatan⁵. Untuk itu, perjalanan yang dilakukan oleh *Residen Zuid-en Ooster van Borneo*, J. G. A. Gallois ditemani oleh Penguasa Sipil, H. von Dewall, yang diadakannya pada bulan Oktober 1850.⁶

² *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda tahun 1839-1848*, Arsip Nasional Republik Indonesia, Penerbitan Sumber-sumber Sejarah No. 5 (Jakarta, 1973), hlm. LXXXIX.

³ *Ibid.*, hlm. XC.

⁴ *Besluit Gubernur Jenderal 25 Agustus 1849 La C2 geheim, ANRI.*

⁵ Politik *Verslag* lampiran tahun 1850, "Laporan Perjalanan Residen ZOB", No. 6/11, *ANRI*

⁶ J. G. A. Gallois, "Korte aantekeningen, gehouden gedurende eene reis langs de Oostkust van Borneo, verrigt op last van het Nederlandsch Indisch Gouvernement, in de jaare 1850", *BKI*, IV, 1856, hlm. 222.

2. Permasalahan

Pada makalah ini penulis ingin menggambarkan bagaimana perdagangan di pelabuhan Samarinda pada abad ke-19, yaitu masa pelabuhan Samarinda sebagai pelabuhan Kesultanan Kutai, yang di bawah pengaruh penjajah Hindia Belanda di Borneo selatan dan timur. Makalah ini juga ingin mengangkat bagaimana penguasa dan syahbandar berusaha untuk menjaga aktivitas perdagangan di Samarinda agar selalu tetap ramai dan aman, sehingga dapat memberikan pemasukan yang cukup untuk kesultanan.

Selama proses perumusan makalah ini, digunakan data-data sejarah berupa sumber naskah, dokumen dan buku-buku yang relevan untuk merekonstruksikan kejadian pada abad ke-19 tersebut. Tentunya dengan menggunakan metode sejarah yaitu, mencari data, menyeleksi, interpretasi dan penulisan sejarah pelabuhan Samarinda pada abad ke-19.

B. Perdagangan di Pelabuhan Samarinda.

Samarinda merupakan pintu gerbang Kesultanan Kutai. Sebelum barang-barang masuk ke Kesultanan Kutai, barang-barang tersebut harus melalui pelabuhan Samarinda, yang merupakan pelabuhan kesultanan. Dari Samarinda, barulah barang-barang diangkut oleh pedagang-pedagang Bugis ke Tenggarong (ibukota kerajaan) dan daerah Ulu Mahakam, yang harus mendapat izin dari sultan. Seperti yang dilaporkan oleh A. L. Weddik, bahwa pada tahun 1847, Samarinda sudah merupakan pelabuhan yang sangat ramai, terutama dengan keluar masuknya kapal di pelabuhan, terdapat kurang lebih 30 kapal milik orang asing yang berdagang di sana⁷. Orang asing yang berdagang di sana tidak boleh berdagang di Tenggarong tanpa izin dari sultan.⁸

Samarinda, yang merupakan pelabuhan Kesultanan Kutai, berpenduduk lebih kurang 5000 jiwa pada tahun 1847⁹. Sebagian besar adalah orang Bugis yang kegiatannya terutama berdagang. Perdagangan yang ada dengan Samarinda adalah terutama ke Jawa, Sulawesi, Singapura dan Sulu. Pelabuhan ini diatur oleh seorang syahbandar¹⁰ yang bertugas mengatur kegiatan di pelabuhan. Selain itu, ada jabatan Pua Adu dan Imam (mengatur dalam masalah agama Islam) yang ikut juga berperan untuk kegiatan pelabuhan Samarinda.

Pua Adu ini adalah kepala dari orang-orang Bugis di Samarinda. Sebagai penasehat, ia sangat dihormati. Pada tahun 1847, jabatan Pua Adu ini kosong. Kekosongan ini sudah berlangsung lebih dari satu tahun karena Pua Adu yang terakhir, Daeng Mangerang, meninggal dunia pada tahun 1846. Sementara itu, di Samarinda sering terjadi pencurian. Pencurian yang sering terjadi di tempat-tempat yang banyak didiami oleh orang Kutai dan Banjar, sehingga orang menganggap ketidakamanan di Samarinda akibat tidak adanya Pua Adu sebagai pemimpin dan sebagai penasehat mereka dalam masalah kemasyarakatan¹¹.

⁷ BZO, 129, *ANRI*.

⁸ *Algemeene Verslag 1847, ANRI*.

⁹ *Politieke Verslag 1847, ANRI*.

¹⁰ Syahbandar yang berkuasa pada perempat abad ke-19 adalah syahbandar Said Abdullah, yang dalam 2 atau 3 bulan sekali selalu mengadakan rapat di istana atau di rumah syahbandar untuk melaporkan tentang keadaan perdagangan di pelabuhan Samarinda.

¹¹ BZO, 129, *ANRI*.

Situasi tidak aman di Samarinda ini diperhatikan oleh H. von Dewall, sebagai penguasa di sana. Ia meminta kepada wali-wali sultan untuk mengadakan persidangan dengan imam dan syahbandar untuk memilih Pua Adu dalam suratnya tanggal 12 Maret 1847. Pada bulan Maret 1847 itu pula diadakan rapat untuk pemilihan Pua Adu. Rapat itu dihadiri oleh Syahbandar, Imam, Mangku Bumi dan beberapa orang Bugis di Samarinda, tetapi dalam rapat ini tidak ada yang ingin diangkat sebagai Pua Adu, sehingga rapat ini tidak menghasilkan seorang Pua Adu pun. Mereka beranggapan bahwa penghasilan seorang Pua Adu sangat sedikit, yaitu didapat dari pajak atas setiap kapal yang berlabuh di pelabuhan Samarinda sebanyak 4 real. Di samping itu, sebagian besar penduduk Kutai tidak menginginkan adanya Pua Adu karena semasa Pua Adu (Daeng Mangerang) hidup, ia pernah membela tertuduh yang nyata-nyata bersalah sehingga rumahnya diserbu oleh penduduk¹².

Pelabuhan Samarinda pada pertengahan abad ke-19 menurut laporan Belanda merupakan pelabuhan yang tidak aman. Keadaan yang tidak aman di Samarinda ini tidaklah berarti terhentinya kegiatan perdagangan di sana. Banyak imigran yang datang dari Sulawesi dan Banjarmasin ke Samarinda dan Tenggarong. Di pelabuhan Samarinda yang berkuasa adalah syahbandar. Dia memungut pajak impor dan ekspor sebanyak 5 %. Selain itu, syahbandar melaksanakan monopoli garam yang dikuasakan oleh sultan. Setiap tahun, garam yang masuk di pelabuhan untuk Kutai sendiri sebanyak 100 koyang (sama dengan 375 koyang Jawa). Pedagang Bugis menjualnya f. 160 per koyang besar garam kepada syahbandar, kemudian syahbandar (Bandar) menjualnya dengan harga f. 300 atau kadang-kadang f. 400 kepada penduduk Kutai¹³.

Peraturan pajak barang-barang impor dan ekspor sebanyak 5 % dari sultan ini tidak selalu dipegang oleh syahbandar. Ia juga memungut pajak untuk barang-barang ekspor sebanyak f. 1 untuk setiap pikul getah perca; f. 2 untuk setiap pikul lilin; f. 0,60 untuk setiap 100 ikat rotan. Hasil yang dipungut syahbandar, yang dipercayakan oleh Sultan padanya, tidak semua diserahkan. Sebagian besar dihamburkannya dengan berjudi, sehingga yang sampai ke tangan sultan hanya sisanya, setelah dipotong untuk para wali sultan¹⁴. Selain itu, pejabat-pejabat agama, Pua Adu, syahbandar di Samarinda, mendapat hasil dari kapal yang berlabuh, yaitu:

- | | |
|---|----------|
| a. Untuk sebuah kapal dengan perlengkapan Eropa dengan tiga tiang | f. 1.50; |
| b. Untuk sebuah kapal dengan perlengkapan Eropa dengan dua tiang | f. 1.00; |
| c. Untuk tiap perahu rakyat tanpa bendara | f. 0.50; |

Hasil lainnya yang didapat oleh pejabat Samarinda dalam wewenang mengeluarkan surat pas (surat jalan), surat lunas pajak bagi perahu-perahu yang berasal dari Kutai dengan biaya sebesar¹⁵:

- | | |
|--|---------|
| a. Untuk setiap perahu Jawa yang keluar | f. 14,- |
| b. Untuk setiap perahu Makassar yang keluar | f. 3,- |
| c. Untuk setiap perahu Singapura yang keluar | f. 14,- |

¹² *Ibid.* Algemeene Verslag 1847, ANRI.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Algemeene Verslag 1853, ANRI; Taufik Abdullah; op. cit.*, hlm. 140.

Kegiatan pelabuhan Samarinda dapat dilihat dari hasil impor dan ekspor, misalnya, untuk tahun 1847 dapat diuraikan dari hasil catatan Penguasa Sipil H. von Dewall yang mengadakan perjalanan sepanjang pantai timur Kalimantan, pada perjalanannya yang pertama dari 1 November 1846 sampai 2 September 1848. Hasil impor dari pelabuhan Samarinda pada tahun 1847 terdiri atas:

Nama Barang	Ukuran	Hasil dari	Nilai harga	Jumlah
Garam	100 koyang	Sulawesi	f. 180 per koyang	f. 18.000
Tembakau	200 kodi	Jawa	f. 480 per koyang	f. 96.000
Candu	12 peti	Singapura	f. 320 per koyang	f. 38.400
Mata uang perak	600 pikul	Singapura	f. 66 per pikul	f. 39.600
Kain lena (Eropa)		Jawa, Singapura dan Lombok		
Kain lena (pribumi)		Sulawesi dan Singapura		f. 200.000
Gambir		Singapura		
Senjata api, mesiu, dan lain-lain		Singapura		
Barang dagangan Cina		Jawa dan Singapura		
Beras		Sulawesi		
Gula (aren)		Sulawesi		
Minyak (kelapa)		Sulawesi		
Kelapa (tua)		Sulawesi		
Tembakau (Bali)		Lombok		
			Jumlah ¹⁶	f. 392.000

Selanjutnya, hasil ekspor pelabuhan Samarinda tahun 1847 adalah:

Nama Barang	Ukuran	Daerah yang dituju	Nilai Barang	Jumlah
Sarang burung putih jenis No. 1 dan No. 2	348 kati	Jawa dan Singapura	f. 360 per 6 kati	f. 20.880
Sarang burung hitam jenis kesatu	30 pikul	Singapura	f. 160 per pikul	f. 4.800
Sarang burung jenis kedua	8 pikul	Singapura	f. 80 per pikul	f. 640
Lilin	4000 pikul	Jawa, Singapura, Sulawesi	f. 90 per pikul	f.360.000
Rotan	300.000 ikat	Jawa, Singapura	f. 12 per 100 ikat	f. 36.000
Teripang	50 pikul	Singapura	f. 40 per pikul	f. 2.000
Karet	50 kati	Singapura	f. 1.50 per pikul	f. 750
			Jumlah hasil ekspor ¹⁷	f. 429.070

¹⁶ BZO No. 129, *ANRI*.

¹⁷ *Ibid.*

Untuk melihat apakah ada perubahan dari kegiatan ini, dapat dibandingkan hasil impor dan ekspor pelabuhan Samarinda pada tahun 1852, sewaktu Asisten Residen dari Zuid-en Oost van Borneo yang kedua, J. Zwager (J. Zwager menggantikan C. Boscher pada tahun 1853, C. Boscher bertugas hanya satu tahun untuk menggantikan penguasa sipil H. von Dewall) yang berkedudukan di Samarinda. Dari laporannya dapat diuraikan impor dan ekspor tahun 1853 pelabuhan Samarinda. Hasil ekspor pelabuhan Samarinda tahun 1853 adalah:

- 4 pikul (= 480 kati) sarang burung putih @ f. 5.000 per pikul	f.	20.000
- 60 pikul (=7200 kati) sarang burung hitam @ f. 100 per pikul	f.	6.000
- 1500 pikul (= 180.000 kati) lilin @ f. 90 per pikul	f.	135.000
- 1000 pikul (= 120.000 kati) getah perca @ f. 30 per pikul	f.	30.000
- 1000 pikul ikat rotan, per 100 ikat @ f. 6 per pikul	f.	60.000
- 500 pikul damar @ f. 1 per pikul	f.	500
- Tikar rotan, tongkat semambu, minyak tanah dan beberapa barang lainnya seharga	f.	3.000
- Penyu dan teripang dari Bontang	f.	5.000
	Jumlah¹⁸	f. 259.500

Hasil impor dari pelabuhan Samarinda tahun 1853 adalah”

6 peti candu	seharga	f. 10.800
70 kodi tembakau Jawa	seharga	f. 33.600
2000 pikul garam	seharga	f. 1.500
kopi dan gula	seharga	f. 1.500
150 pikul gambir	seharga	f. 1.800
1.000.000 butir kelapa	seharga	f. 3.000
150 pikul minyak kelapa	seharga	f. 3.500
Sutera dan benang emas serta perak tulen	seharga	f. 2.000
Salampare biru dan putih	seharga	f. 20.000
Kain wol bermotif bunga-bunga	seharga	f. 3.000
Sarung Bugis	seharga	f. 10.000
Kain kasar bermotif kembang	seharga	f. 1.500
Belacu merah dan putih, kain putih, sarung Eropa, selendang dan lain-lain	seharga	f. 110.000
Sutera kasar, cat celup	seharga	f. 2.500
Pecah belah Eropa dan Cina	seharga	f. 2.000
Barang-barang dari kuningan	seharga	f. 7.000
Perkakas besi	seharga	f. 2.000
Rempah-rempah dan merica	seharga	f. 1.000
Uang perak	seharga	f. 10.000
	Jumlah¹⁹	f. 226.700

¹⁸ Taufik Abdullah, *op. cit.*, hlm. 136.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 157.

C. Menurunnya Ekspor Impor di Pelabuhan Samarinda

Dari kedua perbandingan hasil impor dan ekspor dari tahun 1847 dan 1853 terlihat kemunduran, baik dalam impor maupun ekspor bagi pelabuhan Samarinda. Hal ini karena keadaan yang tidak aman bagi perdagangan di sana, yang banyak dilakukan di sungai-sungai dengan jukung atau sampan. Sampan merupakan alat angkutan satu-satunya, karena tidak ada penghubung jalan darat. Jumlah perahu besar di pelabuhan Samarinda pada tahun 1847 ada sekitar 30 buah perahu layar ditambah satu kapal layar cepat, yang berasal dari Sulawesi, Jawa, Singapura dan Sulu²⁰. Sedangkan di Samarinda, pada tahun 1853 ada kurang lebih 12 kapal layar besar, 40 buah perahu layar dan sebuah kapal layar cepat. Sebagian besar kapal-kapal itu datang dari Sulawesi, yang kemudian berlayar ke Pasir, Berau, Solok, Magindanau, Singapura, Bali, Jawa, dan daerah sekitarnya²¹. Jumlah perahu dan kapal di Samarinda antara tahun 1847 dan 1853 meningkat. Sebab-sebab lain menurunnya hasil impor dan ekspor, walaupun jumlah kapal meningkat, adalah menurunnya harga rotan, getah perca dan damar²². Selain harga ekspor yang menurun, volume ekspor juga menurun. Hal ini disebabkan karena pengumpulan hasil ekspor yang menurun harganya tersebut, dilakukan oleh orang-orang Dayak. Pengumpulan hasil hutan ini ternyata kurang begitu baik dilakukan oleh orang-orang Dayak, sehingga produksi hasil hutan itu menurun dalam waktu yang cukup panjang. Misalnya ini terjadi pada pengumpulan getah perca. Hal ini karena adanya pertambangan yang mulai berkembang, maka berubahlah lapangan kerja orang-orang Dayak itu sebagai pekerja tambang²³.

Walaupun mengalami kemunduran, baik dalam impor maupun ekspor, tetapi pelabuhan Samarinda cukup ramai dengan datangnya pedagang-pedagang Inggris dari Lombok, yaitu G. P. King (pemilik perusahaan), Morgan (agen) dan Carter (pembukuan)²⁴. Mereka di Samarinda bukan saja berdagang, tetapi juga mengadakan penyelidikan tentang keadaan tanah di sekitar Sungai Mahakam, sehingga mereka menemukan tempat-tempat yang mengandung lapisan batu bara di sana. Untuk memperluas perdagangannya, G. P. King mendapat persetujuan dari residen setempat untuk mendirikan kantor, gudang, dan melabuhkan kapal layarnya di Muara Bayur. Hubungan mereka dengan Sultan sangat baik, bahkan Sultan menggadaikan penguasaan pelabuhan Samarinda kepada G. P. King seharga f. 600 setiap bulan, tetapi ditolak²⁵. Merasa dirinya sebagai seorang pedagang dan bukan seorang syahbandar atau pemungut cukai, maka G. P. King menolak diberikan penguasaan pelabuhan Samarinda untuk menjadi syahbandar, sedangkan hasil-hasil dari pelabuhan Samarinda untuk pihak Sultan sendiri, tidak sampai ke tangan seperti yang dikehendaki Sultan, tetapi jauh lebih sedikit daripada yang diharapkannya, seperti yang dilaporkan oleh Asisten Residen J. Zwager²⁶.

Sesudah G. P. King, berangsur-angsur datang pedagang-pedagang Barat ke Samarinda, ada yang mempunyai kantor dagang (Firma P. Landberg en Zoon) di Batavia tetapi menempatkan perwakilannya di Samarinda, dengan kegiatan membawa

²⁰ A. L. Weddik, *loc. cit.*, hlm. 86.

²¹ Taufik Abdullah, *op. cit.*, hlm. 133.

²² Algemeene Verslag tahun 1853, BZO ANRI.

²³ Carl Bock, *Reis in Oost Zuid Borneo, van Koetei naar Banjermessin*, (s' Gravenhage, 1887), hlm. 87.

²⁴ BZO No. 126, ANRI.

²⁵ R. Broesma, *op. cit.*, hlm. 171-173; Politiek Overzicht, tahun 1856. BZO, ANRI.

²⁶ Politiek Overzicht, tahun 1856 BZO, ANRI.

beras dari Batavia dan kemudian mengangkut rotan dan getah perca. Selain itu, sebuah kantor dagang di Hongkong, mempunyai perwakilan di Samarinda dan Tenggarong, yang dikepalai oleh seorang agen dari Italia yang bernama Musso. Bahkan dengan Musso, Sultan mendirikan sebuah perseroan di Samarinda dengan nama Hongkong-Singapore-Borneo Trading Company²⁷.

Dari tahun ke tahun, Samarinda mempunyai arti bagi penguasa Belanda di pantai timur Kalimantan, apalagi dengan ditematkannya Asisten Residen di sana (yang pertama kali, yaitu Asisten Residen C. Boscher tahun 1853)²⁸. Pelabuhan Samarinda menjadi ramai dengan lalu lintas kapal di Sungai Mahakam. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kapal yang datang pada tahun 1870, yaitu 38 buah kapal besar (*raschepen*) dan 130 perahu layar, di samping jumlah kapal yang berangkat 39 buah kapal besar dan 118 kapal layar. Nilai impornya pada tahun 1870 adalah f. 238.505, sedangkan nilai ekspor dari pelabuhan Samarinda sebesar f. 1.744.508²⁹. Dari angka-angka ini terlihat bahwa perbedaan nilai ekspor dan impor cukup besar, yaitu dengan bertambahnya kegiatan pelabuhan Samarinda dan jumlah kapal yang berlabuh di sana.

Untuk kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhan Samarinda pada tahun 1870, sultan memungut uang labuh sebesar f. 17 bagi setiap kapal tanpa memperhatikan negara asal kapal itu. Sultan juga memungut cukai atas setiap jenis barang-barang impor sebesar 5 %, misalnya, katun, beras, kelapa, barang pecah belah dari Cina, tembakau, garam, candu, dan lain-lain. Garam dan candu merupakan monopoli sultan. Dari ekspor, sultan pun memungut cukai sebesar 5 % tanpa memperhatikan asal kapal yang mengangkut barang-barang ekspor tersebut. Selain itu pula, sultan memungut pajak f. 1 untuk setiap 100 ikat rotan (rata-rata 3 ½ pikul) yang diekspor; f. 5 untuk setiap pikul lilin, f. 2.50 untuk setiap pikul getah perca dan f. 6 untuk setiap kati sarang burung.³⁰

D. Kesimpulan

Akibat adanya pengaruh penguasa Belanda yang berkedudukan di Samarinda, penemuan batu bara, dan banyaknya kapal yang masuk ke pelabuhan Samarinda, maka dapat dikatakan bahwa perekonomian Kesultanan Kutai sedikit demi sedikit mulai meningkat. Tetapi di samping itu, kebebasan untuk melakukan tindakan perekonomian bagi kesultanan mulai berkurang, akibat adanya pengaruh Pemerintah Hindia Belanda dalam kesultanan semakin mendalam.

²⁷ Algemeene Verslag tahun 1871, BZO, *ANRI*.

²⁸ *Reg. Almanak* 1853.

²⁹ Koloniaal Verslag tahun 1872, Algemeene Verslag tahun 1871, BZO *ANRI*.

³⁰ *Ibid.*

Daftar Pustaka

Arsip

Algemeene Verslag 1847, *ANRI*.

Algemeene Verslag 1853, ANRI;

Algemeene Verslag tahun 1871, BZO, *ANRI*

Besluit Gubernur Jenderal 25 Agustus 1849 La C2 geheim, *ANRI*.

BZO. No. 126, *ANRI*.

BZO, No. 129, *ANRI*.

Ged.Komm. 5 December 1845 La A 10, *ANRI*.

Koloniaal Verslag tahun 1872, *ANRI*.

Politieke Verslag 1847, *ANRI*.

Politik Verslag lampiran tahun 1850, "Laporan Perjalanan Residen ZOB", No. 6/11,
ANRI

Politiek Overzicht, tahun 1856. BZO, *ANRI*.

Buku

Abdullah, Taufik (ed). (1978). *Sejarah Lokaldi Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.

Bock, Carl.(1887). *Reis in Oost-en Zuid-Borneo van Koetei naar Banjarmassin*, 's Gravenhage: Martinus Nijhoff.

Broersma, R. Dr. (1927). *Handel en Bedrijf in Zuid en Oost Borneo*. 's Gravenhage: G. Naeff.

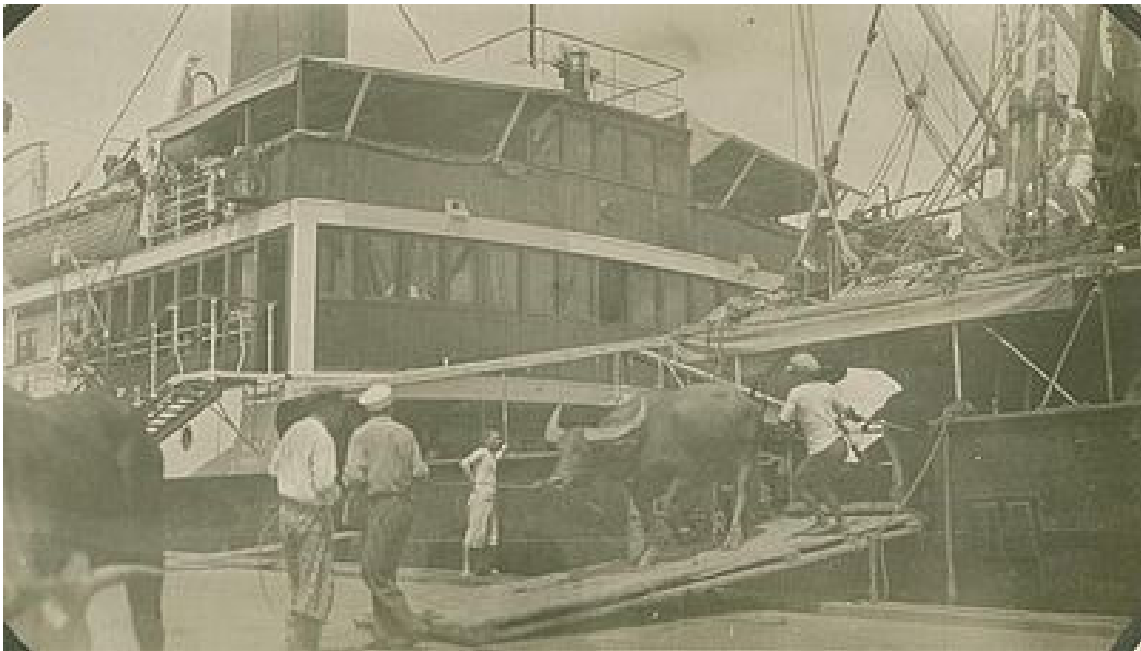
Gallois, J. G. A. (1856). "Korte aantekeningen, gehouden gedurende eene reis langs de Oostkust van Borneo, verrigt op last van het Nederlandsch Indisch Gouvernement, in de jaare 1850", BKI, IV.

Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda tahun 1839-1848. (1973). Penerbitan Sumber-sumber Sejarah No. 5, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

Regering Almanak 1853.

Weddik, A., L.(1849), "Beknopt overzicht van het Rijk van Koetei", *Indisch Archief*, I, jaar 1e, 1.

Lampiran Foto
Pelabuhan Samarinda pada tahun 1930



Collection KITLV, Leiden